

BAB II

KAJIAN TEORI

1.1. Model Cooperative Learning

1.1.1. Pengertian Model Cooperative Learning

Model sangat penting dalam pembelajaran, menurut pendapat Sudjana (1989, hlm. 95) mengatakan model pembelajaran merupakan penunjang dalam pembelajaran. Banyak sekali model dalam pembelajaran salah satunya model *Cooperative Learning* mengandung pengertian bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari dua sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Keberhasilan belajar dan kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individual maupun secara kelompok. (Rusman, 2011: 202).

Cooperative learning didefinisikan sederhana sebagai sekelompok kecil pembelajaran yang bekerja sama menyelesaikan masalah, merampungkan tugas atau menyelesaikan tugas bersama. Sehingga catatan mengharuskan peserta didik bekerja sama dan saling bergantung secara positif antar satu sama lain dalam konteks struktur tugas, struktur tujuan dan struktur penghargaan. Gagasan ini upaya yang dirancang untuk menyampaikan materi sedemikian rupa sehingga peserta didik benar-benar bisa bekerja sama untuk mencapai sasaran-sasaran pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dalam ruang lingkup lebih luas yaitu kontribusi perkembangan terhadap pendidikan di Indonesia searah dengan cita-cita luhur pendiri bangsa ini.

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang dalam pelaksanaannya mengedepankan manfaat kelompok-kelompok peserta didik. Menurut Slavin (2010, Hlm. 09) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-5 orang dengan struktur

kelompok heterogen. Sedangkan menurut Trianto (2009, hlm. 15) menyatakan “bahwa dalam belajar kooperatif peserta didik belajar bersama sebagai satu tim dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama”. Dengan demikian pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan belajar peserta pada didik dan meningkatkan sikap tolong menolong dalam perilaku sosial, sehingga dalam proses ini akan terjadi partisipasi dalam pembelajaran karena ada interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan kelompok dan peserta didik dengan guru.

1.1.2. Tujuan Model Cooperative Learning

Menurut Isjoni, (2010. hal. 27) tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Sedangkan menurut Ibrahim model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaknya-tidaknya tiga tujuan pembelajaran, yaitu:

1) Hasil belajar akademik

Dalam belajar kooperatif mencakup beragam tujuan sosial, dan memperbaiki prestasi peserta didik atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu peserta didik memahami konsep-konsep sulit. Model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai peserta didik pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada peserta didik kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik.

2) Penerimaan terhadap perbedaan individu

Pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi peserta didik dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk saling menghargai satu sama lain.

3) Pengembangan keterampilan sosial

Pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial, penting dimiliki oleh peserta didik sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam keterampilan sosial.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan pembelajaran kooperatif adalah untuk menciptakan suasana belajar yang saling mendukung dalam bentuk kerja sama antar peserta didik dan guru sehingga akan menghasilkan tiga tujuan pembelajaran yang mencangkup kepada hasil belajar peserta didik meningkat dan dapat memperbaiki prestasi belajar peserta didik, kemudian penerimaan terhadap perbedaan individu yang dapat di artikan adanya proses interaksi antar peserta didik, dan pengembangan keterampilan sosial guna meningkatkan interaksi dalam proses kerja sama dalam pembelajaran.

1.1.3.Prinsip Pembelajaran Model Cooperative Learning

Menurut Roger (dalam Rusman, 2011, hlm. 212) ada lima unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*), yaitu sebagai berikut.

1) Prinsip ketergantungan positif (*positive interdependence*),

Prinsip ketergantungan positif yaitu dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota kelompok. Oleh karena itu, semua anggota dalam kelompok akan merasakan saling ketergantungan.

2) Tanggung jawab perseorangan (*individual accountability*),

Tanggung jawab perseorangan yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut.

3) Interaksi tatap muka (*face to face promotion interaction*),

Interaksi tatap muka yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain.

4) Partisipasi dan komunikasi (*participation communication*),

Partisipasi dan komunikasi yaitu melatih peserta didik untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran.

5) Evaluasi proses kelompok,

Evaluasi proses kelompok yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.

Dengan demikian dari prinsip di atas menunjukkan bahwa ada lima prinsip yang menjadi dasar dalam pembelajaran *cooperative learning* diantaranya; prinsip ketergantungan positif (*positive interdependence*), tanggung jawab perseorangan (*individual accountability*), interaksi tatap muka (*face to face promotion interaction*), partisipasi dan komunikasi (*participation communication*) dan evaluasi proses kelompok, kelima prinsip tersebut menjadi dasar keberhasilan dalam penyelesaian tugas dalam proses pembelajaran serta prinsip tersebut dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar, sehingga siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa menjadi bertambah, tidak hanya itu dalam prinsip tersebut terdapat tanggung jawab siswa dalam pembelajaran yang sesuai dengan pendapat dari Roger, dkk 1992 (dalam Miftahul Huda 2012: 29) menyatakan bahwa, Pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain. Sehingga prinsip dasar *cooperative learning* tersebut dapat meningkatkan partisipasi peserta didik melalui tanggung jawab peserta didik pada proses diskusi dalam kelompoknya masing-masing.

1.1.4. Keunggulan dan Kelemahan Model Cooperative Learning

1.1.4.1. Keunggulan pembelajaran kooperatif sebagai suatu model pembelajaran diantaranya:

Pada dasarnya pembelajaran kooperatif sebagai suatu model selalu memiliki keunggulan dan kekurangan dalam proses pelaksanaannya, dalam hal ini terdapat beberapa keunggulan menurut Wina (2008, hlm. 249), keunggulan tersebut sebagai berikut:

- 1) Melalui *cooperative learning* peserta didik tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari peserta didik yang lain;
- 2) *Cooperative learning* dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain;
- 3) *Cooperative learning* dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan;
- 4) *Cooperative learning* dapat membantu memberdayakan setiap peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar;
- 5) *Cooperative learning* merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain, mengembangkan keterampilan mengelola waktu, dan sikap positif terhadap sekolah;
- 6) Melalui *cooperative learning* dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. Peserta didik dapat berpraktik memecahkan masalah tanpa takut membuat masalah, karena keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya;
- 7) *Cooperative learning* dapat meningkatkan kemampuan peserta didik menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata (riil);
- 8) Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Hal ini berguna untuk proses pendidikan jangka panjang.

Dengan demikian keunggulan dalam pembelajaran kooperatif yang diterapkan sebagai model di mana keunggulan tersebut menjadi acuan sebagai komponen yang menguntungkan dalam pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran dapat menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan.

1.1.4.2. Kelemahan pembelajaran kooperatif sebagai suatu model pembelajaran, diantaranya:

Pembelajaran dengan model kooperatif juga memiliki kelemahan dalam proses pelaksanaannya, di mana kelemahan tersebut yang menjadi hambatan ketikan

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pembelajaran sedang berlangsung, dalam hal ini menurut Wina (2008, hlm. 250) menyebutkan beberapa kelemahan model pembelajaran kooperatif sebagai berikut:

1) Untuk peserta didik yang dianggap memiliki kelebihan, contohnya mereka akan merasa terhambat oleh peserta didik yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan semacam ini dapat mengganggu iklim kerja sama dalam kelompok; 2) Ciri utama dari *cooperative learning* adalah bahwa peserta didik saling membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa *peer teaching* yang efektif, maka dibandingkan dengan pengajaran langsung dari guru, bisa terjadi cara belajar yang demikian apa yang seharusnya dipelajari dan dipahami tidak pernah dicapai oleh peserta didik; 3) Penilaian yang diberikan dalam *cooperative learning* didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari, bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu peserta didik; 4) Keberhasilan *cooperative learning* dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan waktu yang cukup panjang, dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu kali atau berkali-kali penerapan pembelajaran ini; 5) Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk peserta didik, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang hanya didasarkan pada kemampuan secara individual. Oleh karena itu, idealnya melalui *cooperative learning* selain peserta didik belajar bekerja sama, peserta didik juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan diri. Untuk mencapai kedua hal itu dalam *cooperative learning* memang bukan pekerjaan yang mudah.

Dengan demikian kelemahan dalam pembelajaran kooperatif menganggap hanya beberapa peserta didik yang aktif, penilaian sering dilakukan dengan cara kelompok dan kemampuan peserta didik dalam berdiskusi hanya mengandalkan individu peserta didik tertentu, sehingga tidak semua peserta didik dapat bekerja sama dalam proses diskusi.

1.2. Number Heads Together

1.2.1. Pengertian Number Head Together

Pembelajaran kooperatif tipe *Numbered Heads Together* dikembangkan oleh Spencer Kagan (1993) untuk melibatkan lebih banyak peserta didik dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut Trianto, (2009, hlm. 82). Menurut Huda (2012, hlm. 87) mengatakan bahwa pada umumnya *Numbered Heads Together* digunakan untuk melibatkan peserta didik dalam penguatan pemahaman pembelajaran atau mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Hal ini mengarahkan agar

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terdapat unsur timbal balik antara guru dan peserta didik sehingga peserta didik tidak hanya menerima materi dari guru tetapi peserta didik juga mencari materi tersebut dengan kelompoknya, dengan demikian peserta didik dapat menunjukkan peran aktifnya dalam pembelajaran sehingga peserta didik menunjukkan sikap partisipasinya dalam proses pembelajaran.

Sementara, Huda (2012, hlm. 130), menyatakan bahwa “pada dasarnya *Numbered Heads Together* merupakan varian dari diskusi kelompok, Teknik pelaksanaannya hampir sama dengan diskusi kelompok”. Sehingga model *Numbered Heads Together* dapat meningkatkan keaktifan belajar lebih baik, dan sikap tolong menolong dalam beberapa perilaku sosial. Pada saat belajar guru harus berusaha menanamkan sikap demokrasi untuk peserta didiknya, maksudnya suasana harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan kepribadian peserta didik yang demokratis dan di harapkan suasana yang terbuka dan kebiasaan-kebiasaan kerja sama, terutama dalam memecahkan kesulitan-kesulitan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang mengutamakan keaktifan peserta didik dengan adanya pembentukan kelompok-kelompok kecil sehingga dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah *Numbered Heads Together*

2.2.2. Tujuan Number Head Together

Model pembelajaran *Number Head Together* yang merupakan salah satu model dalam pembelajaran kooperatif memungkinkan terwujudnya kondisi belajar di mana peserta didik dapat mengembangkan berbagai kemampuan dalam bersosialisasi, belajar mandiri dan bekerja sama dalam pembelajaran, *Number Head Together* sendiri memiliki tujuan penting dalam pembelajaran, menurut Herdian (2009, hal. 7) ada tiga tujuan yang dicapai dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT : 1) Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik; 2) Siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang; 3) Dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagai tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat, bekerja dalam kelompok.

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK(PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan pendapat di atas dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT diharapkan dapat meningkatkan kinerja siswa dalam mengerjakan tugas-tugas, siswa dapat menerima berbagai latar belakang teman-temannya, dan dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya.

Tujuan di atas sangat melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran akan berdampak baik pada hasil belajarnya. Seperti yang dikemukakan oleh Djamarah, (2000, hlm. 67) bahwa: Belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang dapat didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan di dalam benak anak didik. Dengan demikian tujuan *Number Head Together* secara umum untuk meningkatkan proses partisipasi peserta didik dalam pembelajaran dikelas yang melibatkan aktivitas siswa untuk ketercapaian materi pembelajaran.

1.2.3. Kelebihan dan Kekurangan Number Head Together

1.2.3.1. Kelebihan *Number Head Together*

Pada dasarnya tidak ada model pembelajaran yang cocok untuk setiap bahasan, karena setiap model masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan model tersebut, dalam hal ini Menurut Wina (2008, hlm. 249) keunggulan dari pembelajaran kooperatif *Number Head Together* sebagai berikut:

- 1) Peserta didik tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri;
- 2) Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan;
- 3) Dapat memberdayakan peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar;
- 4) Dapat meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial;
- 5) Dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik;
- 6) Dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir.

Sehingga dengan demikian penggunaan model *number head together* dapat memberikan manfaat seperti peserta didik dapat memperhatikan guru, siswa menjadi aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran, siswa menjadi percaya diri, menumbuhkan rasa setia kawan dan jiwa sosialnya muncul karena saling bekerja sama

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan teman untuk berdiskusi dalam pembelajaran, hal tersebut menjadi kelebihan dalam model pembelajaran *number head together*.

1.2.3.2. Kekurangan *Number Head Together*

Number head together merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bertukar pikiran dan meningkatkan partisipasi belajar melalui kerja sama dalam diskusi tetapi ada kelemahan dalam pembelajaran *Number head together* Menurut Wina (2008, hlm. 249) adalah sebagai berikut: 1) Dengan luasnya pembelajaran maka apabila keleluasaan itu tidak optimal maka tujuan dari apa yang dipelajari tidak akan tercapai; 2) Penilaian kelompok dapat membutuhkan penilaian secara individu apabila guru tidak jeli dalam pelaksanaannya dan 3) Mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan waktu yang panjang.

Dengan demikian kelemahan yang terdapat dalam penggunaan model pembelajaran masih dapat diatasi melalui guru membagi waktu yang tepat dalam penggunaan model tersebut, menentukan tujuan pembelajaran sehingga dalam proses penggunaan model *number head together* tidak mengalami materi yang melebar sehingga dapat fokus dalam pembelajaran dan tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai.

1.2.4. Langkah-Langkah *Number Head Together*

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe *Numbered Heads Together* merupakan strategi yang menempatkan peserta didik belajar dalam kelompok (4-6) orang dengan tingkat kemampuan atau jenis kelamin atau latar belakang yang berbeda-beda. Dalam belajar kelompok masing-masing anak diberi nomor pin, setelah mereka selesai berdiskusi dalam menjawab pertanyaan guru, guru akan memanggil salah satu nomor dan peserta didik yang disebutkan nomornya oleh guru harus mewakili masing-masing kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi kepada semua temannya. Oleh karena itu, dengan model *Numbered Heads Together* ini peserta didik lebih aktif karena mereka semua harus benar-benar siap dalam menjawab pertanyaan, karena mereka belum tahu siapa yang akan mewakili setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tersebut.

Menurut Miftahul Huda (2012, hlm. 245), langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe *Numbered head together* yaitu :

- 1) Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada peserta didik sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai;
- 2) Guru memberikan kuis secara individual kepada peserta didik untuk mendapatkan skor dasar atau awal;
- 3) Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 peserta didik, setiap anggota kelompok diberi nomor pin;
- 4) Guru mengajukan permasalahan untuk dipecahkan bersama dalam kelompok;
- 5) Guru mengecek pemahaman peserta didik dengan memanggil salah satu nomor anggota kelompok untuk menjawab. Jawaban salah satu peserta didik yang ditunjuk oleh guru merupakan wakil jawaban dari kelompok;
- 6) Guru memfasilitasi peserta didik dalam membuat rangkuman, mengarahkan dan memberikan penegasan pada akhir pembelajaran;
- 7) Guru memberikan tes/kuis kepada peserta didik secara individual dan
- 8) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individu dari skor dasar ke skor kuis berikutnya.

Numbered Heads Together atau penomoran bersama merupakan jenis pembelajaran kooperatif dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. *Numbered Heads Together* pertama kali dikembangkan Spencer Kagan (1993) untuk melibatkan lebih banyak peserta didik dalam memahami materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengetahui pemahaman peserta didik terhadap isi pelajaran tersebut. Dalam mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta didik, guru menggunakan struktur empat fase sebagai sintak NHT :

Tabel 2.1

Sintak Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (*Numbered Heads Together*)

Fase	Kegiatan Guru dan Peserta Didik
Fase 1 Penomoran	Guru membagi peserta didik kedalam kelompok 4-5 orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1-5.
Fase 2 Mengajukan pertanyaan	Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaan dapat bervariasi. Pertanyaan dapat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya.

Fase 3 Berpikir bersama	Peserta didik menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban itu.
Fase 4 Menjawab	Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian peserta didik yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.

(Sumber : Trianto, 2009:82)

2.2.5. Number Head Together dalam Pembelajaran PPKn

Numbered Head Together merupakan suatu tipe model pembelajaran kooperatif yang merupakan struktur sederhana dan terdiri atas empat tahap yang digunakan untuk meriview fakta-fakta dan informasi dasar yang berfungsi untuk mengatur interaksi siswa”. Pendapat tersebut juga di dukung oleh para ahli yang lain seperti Muslimin (2000, hlm. 65) yang mengemukakan bahwa:

Numbered Head Together adalah salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif dengan sintak: pengarahan, buat kelompok heterogen dan tiap siswa memiliki nomor tertentu, berikan persoalan materi bahan ajar (untuk tiap kelompok sama tetapi untuk tiap siswa tidak sama sesuai dengan nomor siswa, tiap siswa dengan nomor yang sama mendapat tugas yang sama) kemudian bekerja dalam kelompok, presentasi kelompok dengan nomor siswa yang sama sesuai tugas masing-masing sehingga terjadi diskusi kelas, kuis individual dan buat skor perkembangan tiap siswa, umumkan hasil kuis dan beri *reward*”.

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam model pembelajaran di mana peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen”. Jadi, dalam pembelajaran kooperatif sangat menanamkan kerja sama dan gotong royong dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah untuk mencapai sebuah tujuan bersama, sehingga terciptalah suasana belajar yang partisipatif dan aktif.

Model pembelajaran tentu dibutuhkan pada semua mata pelajaran salah satunya PPKn, Pendapat Hidayat (2015, hlm. 3) mengatakan Model pembelajaran kooperatif tipe NHT cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran PPKn karena dengan penggunaan model tersebut, peserta didik diajak untuk aktif dalam pembelajaran. Teknik ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling membagikan

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKn UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK(PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Dengan demikian Penerapan model pembelajaran NHT dalam mata pelajaran PPKn akan membuat aktivitas belajar peserta didik semakin tinggi karena membuat siswa menjadi tertarik dan menyenangkan dalam mengikuti pembelajaran. *Number Head Together* dalam pembelajaran PPKn akan berperan penting karena akan memaksimalkan diskusi siswa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Keberhasilan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya tergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan kompetensi dan materi pembelajaran, tetapi juga didukung oleh metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan model yang tepat dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan membantu guru maupun siswa untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun model yang relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Djamarah dan Zain (2002, hlm. 122) yang berkarakteristik sebagai berikut:

- 1) menekankan pada pemecahan masalah; 2) bisa dijalankan dalam berbagai konteks; 3) mengarahkan siswa menjadi pembelajar mandiri; 4) mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan siswa yang berbeda; 5) mendorong siswa untuk merancang dan melakukan kegiatan ilmiah; 6) memotivasi siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari; 7) menerapkan penilaian otentik; dan 8) menyenangkan

Oleh karena itu, peran guru melalui model pembelajaran *Number Head Together* hendaknya berupaya lebih banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran secara terbuka, demokratis, dan memiliki kebebasan berpendapat. Dapat di generalisasikan bahwa model pembelajaran *Number Head Together* ini sangat relevan sekali dengan PPKn.

1.3. Pembelajaran PPKn

1.3.1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran.

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKn UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Menurut Rusman berpendapat bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain (Rusman, 2011, hlm. 1). Komponen tersebut berupa guru, peserta didik, media, sarana dan lingkungan yang saling terkait. Apabila semua komponen pembelajaran dapat dikelola dengan baik maka proses pembelajaran akan berjalan secara efektif. Menurut Rusmono (2012: 6), pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu kondisi bagi terciptanya suatu kegiatan belajar yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang memadai.

Kesimpulannya pembelajaran merupakan hubungan antara guru, peserta didik dan bahan ajar, sehingga dalam pembelajaran terdapat interaksi peserta didik dan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, hasilnya dalam proses pembelajaran setiap komponen tersebut dapat bekerja sama secara aktif, terkait visi tersebut terdapat prinsip-prinsip dalam belajar pada peserta didik itu sendiri demi ketercapaian proses pembelajaran.

1.3.2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang harus dirumuskan oleh guru dalam pembelajaran, karena merupakan sasaran dari proses pembelajaran. Mau dibawa ke mana siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa, semuanya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya, tujuan merupakan komponen pertama dan utama. Oemar Hamalik (2008, hal. 73) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai, oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan dalam mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi tingkatannya yakni tujuan pendidikan.

Tujuan pembelajaran juga memiliki manfaat bagi para pendidik dalam menentukan ketercapaian dalam proses pembelajaran, seperti dalam pendapat Nana Syaodih Sukmadinata (2002) mengidentifikasi 4 (empat) manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu: 1) Memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

secara lebih mandiri; 2) Memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar; 3) Membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran; 4) Memudahkan guru mengadakan penilaian.

Dari pendapat di atas, tujuan penting dari belajar itu mempunyai banyak sekali manfaat. Tujuan di sini dijadikan sebagai acuan untuk menjalankan suatu program tertentu agar program tersebut dapat berjalan lurus mengikuti arus sesuai dengan apa yang sebelumnya telah ditetapkan. Tujuan itu tidak hanya ditujukan kepada siswa yang dijadikan sebagai objek yaitu siswa diukur ketercapaiannya ketika siswa telah selesai melakukan proses belajar saja, melainkan hal ini saling berkesinambungan antara siswa, guru serta komponen pembelajaran. Dengan adanya suatu tujuan dapat diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa, siswa dengan sistem pembelajaran, guru dengan sistem pembelajaran maupun sebaliknya. Tujuan di sini dapat digunakan sebagai pengontrol setiap kegiatan, misalnya mengukur keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran.

1.3.3. Prinsip Belajar

Prinsip-prinsip dalam belajar baik bagi siswa yang perlu meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan kualitas mengajarnya. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual.

Menurut Suprijono (2011, hlm. 4), prinsip-prinsip belajar yaitu: 1) Prinsip belajar adalah perubahan perilaku; 2) Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai; 3) Belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya.

Pada prinsip pertama di sebutkan bahwa prinsip belajar adalah perubahan perilaku sehingga sering kali belajar itu di gunakan untuk ketercapaian prestasi pada peserta didik dalam proses pembelajaran, yang kedua belajar merupakan sebuah proses yang artinya dalam belajar merupakan proses untuk perubahan kecakapan, sikap, kebiasaan,

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kepandaian yang ada dalam kepribadian seseorang, yang terakhir belajar merupakan bentuk pengalaman karena pengalaman belajar merupakan proses pengumpulan informasi atau data yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik.

1.3.4. Ciri-Ciri Pembelajaran

Dalam suatu pembelajaran dibutuhkan adanya interaksi antara guru dan peserta didik. Selain itu juga harus didukung dengan adanya sumber belajar yang digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran. Menurut Hamalik (2001, hlm. 65) bahwa ada tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran, yaitu :

- 1) Rencana, ialah penataan ketenagaan, materi dan prosedur yang merupakan unsur-unsur pembelajaran, dalam suatu rencana khusus; 2) Saling Ketergantungan (*interpendence*), antara unsur-unsur pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem pembelajaran; 3) Tujuan, pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan utama pembelajaran adalah agar peserta didik belajar.

Suatu pembelajaran dibutuhkan rencana agar apa yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Dalam proses pembelajaran itu pula diperlukan adanya saling ketergantungan antar semua unsur yang ada di dalamnya sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Rusman (2011, hlm. 4) seorang guru memulai tahap perencanaan proses pembelajaran dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Sejalan dengan pendapat Hamalik (2008, hlm 213) yang mengatakan perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan menyusun metode atau dengan kata lain cara mencapai tujuan tersebut.

1.3.5. Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran mengandung arti yaitu kemampuan untuk menghasilkan peserta didik yang lebih baik dan peningkatan kapasitas pembelajaran. Kata kualitas itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah mutu. Sesuatu hal dapat dikatakan berkualitas

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

apabila mempunyai daya jual atau bernilai tinggi. Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Kualitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap orang. Efektivitas juga dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dicapai oleh orang.

Daryanto (2012, hlm. 54) menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Hamdani (2010, hlm. 193) menyatakan kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya (Etzioni dalam Hamdani 2010, hlm. 194). Sementara itu, Bramley (dalam Hamdani 2010, hlm. 194) menyatakan bahwa belajar adalah sebuah komunikasi terencana yang menghasilkan perubahan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam hubungan dengan sasaran khusus yang berkaitan dengan pola perilaku individu untuk mewujudkan tugas atau pekerjaan tertentu.

Indikator kualitas pembelajaran (dalam Depdiknas 2010, hlm. 7-9) dapat dikaji melalui beberapa aspek yaitu :

1) Perilaku pembelajaran pendidik (guru)

Keterampilan dasar mengajar (*teaching skills*), merupakan suatu karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Menurut Depdiknas (2010, hlm. 8) disebutkan bahwa indikator perilaku pembelajaran pendidik (guru): 1) Membangun persepsi dan sikap positif peserta didik terhadap belajar; 2) Menguasai disiplin ilmu; 3) Memahami keunikan setiap peserta didik dengan setiap kelebihan, kekurangan, dan kebutuhan; 4) Menguasai pengelolaan pembelajaran yang tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran.

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2) Perilaku/aktivitas peserta didik

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian, di sekolah merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas. Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh peserta didik di sekolah. Aktivitas peserta didik tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional.

Menurut Depdiknas (2010, hlm. 8) disebutkan bahwa indikator perilaku peserta didik antara lain: 1) Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; 2) Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta membangun sikapnya; 3) Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara bermakna; 4) Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya; 5) Mau dan mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap dan bekerja produktif; 6) Mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum sekolah.

3) Iklim pembelajaran

Menurut Depdiknas (2010, hlm. 8) disebutkan bahwa iklim pembelajaran mencakup: 1) suasana kelas yang kondusif; 2) perwujudan nilai dan semangat keteladanan; 3) suasana sekolah latihan dan tempat berpraktik lainnya yang kondusif bagi tumbuhnya penghargaan peserta didik.

4) Materi pembelajaran

Menurut Depdiknas (2010, hlm. 8) materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: 1) kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik; 2) ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia; 3) sistematis dan kontekstual; 4) dapat mengakomodasi partisipasi aktif peserta didik dalam belajar semaksimal mungkin; 5) dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, teknologi, dan seni; 6) materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, psiko pedagogis, dan praktis.

5) Media pembelajaran

Berdasarkan Depdiknas (2010, hlm. 9) kualitas media pembelajaran tampak dari:

1) dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna; 2) mampu memfasilitasi

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK(PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

proses interaksi antara peserta didik dan guru, peserta didik dan peserta didik, serta peserta didik dengan ahli bidang ilmu yang relevan; 3) dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik; 4) mampu mengubah suasana belajar dari peserta didik pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi peserta didik aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada.

6) Sistem pembelajaran

Depdiknas (2010, hlm. 9) menyebutkan sistem pembelajaran di sekolah mampu menunjukkan kualitasnya jika: 1) sekolah dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan lulusannya, responsif terhadap berbagai tantangan secara internal maupun eksternal; 2) memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis dan rencana operasional sekolah; 3) ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi sekolah yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua sivitas akademika; 4) dalam rangka menjaga keselarasan antar komponen sistem pendidikan di sekolah, pengendalian dan penjaminan mutu perlu menjadi salah satu mekanismenya.

Pemahaman di atas dapat dikemukakan aspek-aspek efektivitas belajar yaitu peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, perubahan perilaku kemampuan adaptasi, peningkatan integrasi, peningkatan partisipasi, dan peningkatan interaksi kultural. Hal ini penting untuk dimaknai bahwa keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik ditentukan oleh efektivitasnya dalam upaya pencapaian kompetensi belajar. Efektivitas belajar ini dapat tercapai apabila empat pilar pendidikan diperhatikan secara sungguh- sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan, belajar untuk menguasai keterampilan, belajar untuk hidup bermasyarakat belajar untuk mengembangkan diri sendiri secara maksimal.

2.3.6. Pengertian Pembelajaran PPKn

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan menciptakan warga negara yang baik menurut Wuryan dan Syaifullah (2008, hlm. 9) mengemukakan bahwa Pendidikan Pancasila menitik beratkan pada moral dan

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK(PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang dirancang untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas yaitu warga negara yang terampil dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menurut Somantri (2001, hlm. 159) pendidikan kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia, yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan IPS Berdasarkan pendapat di atas, PPKn merupakan mata pelajaran interdisipliner ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai bekal warga negara di masa depan agar dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan penting dikarenakan terdapat unsur-unsur dari materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan *kausa materialis* (asal bahan) Pancasila. Menurut Darmadi (2013), sesuai dengan kurikulum 2013, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan penting karena berupaya menanamkan sikap kepada warga negara Indonesia umumnya dan generasi muda bangsa khususnya agar:

1. Memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan dan rasa cinta tanah air sebagai perwujudan warga negara Indonesia yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa dan negara;
- 2) Memiliki wawasan dan penghargaan terhadap keanekaragaman masyarakat Indonesia sehingga mampu berkomunikasi baik dalam rangka memperkuat integrasi nasional;
- 3) Memiliki wawasan, kesadaran dan kecakapan dalam melaksanakan hak, kewajiban, tanggung jawab dan peran sertanya sebagai warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter;
- 4) Memiliki kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia serta kewajiban dasar manusia sehingga mampu memperlakukan warga negara secara adil dan tidak diskriminatif;
- 5) Berpartisipasi aktif membangun masyarakat Indonesia yang demokratis dengan berlandaskan pada nilai dan budaya demokrasi yang

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bersumber pada Pancasila; 6) Memiliki pola sikap, pola pikir dan pola perilaku yang mendukung ketahanan nasional Indonesia serta mampu menyesuaikan dirinya dengan tuntutan perkembangan zaman demi kemajuan bangsa.

Dengan demikian pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting dikarenakan terdapat unsur-unsur dari materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, salah satunya Memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan dan rasa cinta tanah air, memiliki wawasan dan penghargaan terhadap keanekaragaman masyarakat Indonesia, memiliki wawasan, kesadaran dan kecakapan dalam melaksanakan hak, kewajiban, tanggung jawab, berpartisipasi aktif membangun masyarakat Indonesia dan memiliki pola sikap, pola pikir dan pola perilaku yang mendukung ketahanan nasional Indonesia, sehingga pembelajaran PPKn dalam lingkup pendidikan sangat penting karena untuk membangun masyarakat Indonesia menjadi warga negara yang baik.

1.4. Partisipasi Belajar

1.4.1. Pengertian Partisipasi Belajar

Partisipasi peserta didik berarti keikutsertaan peserta didik dalam suatu kegiatan yang ditunjukkan dengan perilaku fisik dan psikisnya. Partisipasi menurut Suryosubroto (2002, hlm. 279) adalah keterlibatan mental dan emosi serta fisik anggota dalam memberikan inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Partisipasi diperlukan dalam pembelajaran, peserta didik harus aktif dalam mengikuti pembelajaran. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Sejalan dengan Rusman (2011, hlm. 323) bahwa pembelajaran partisipatif yaitu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran secara optimal. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang penting dalam interaksi pembelajaran. Belajar yang optimal akan terjadi bila peserta didik berpartisipasi secara tanggung jawab dalam proses belajar. Keaktifan peserta didik ditunjukkan dengan partisipasinya. Keaktifan itu dapat terlihat dari beberapa perilaku misalnya mendengarkan, mendiskusikan, membuat sesuatu, menulis laporan, dan sebagainya.

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKn UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Partisipasi peserta didik dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan dalam kegiatan belajar dan mengajar.

Partisipasi diperlukan dalam proses pembelajaran, sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan maksudnya peserta didik harus aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas sangat penting dalam proses pembelajaran.

Jerrold (dalam Herawati, 2008, hlm.) berpendapat bahwa partisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai hal, diantaranya: 1) Keaktifan peserta didik di dalam kelas, misalnya aktif mengikuti pelajaran, memahami penjelasan guru, bertanya kepada guru, mampu menjawab pertanyaan dari guru dan sebagainya; 2) Kepatuhan terhadap norma belajar, misalnya mengerjakan tugas sesuai dengan perintah guru, datang tepat waktu, memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, dan sebagainya.

Dari uraian yang disampaikan oleh Jerrold (dalam Yeni Herawati, 2008) partisipasi tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa jenjang, yaitu :

- 1) Menerima, yaitu peserta didik mau memperhatikan suatu kejadian atau kegiatan. Contohnya peserta didik mau mendengarkan apa yang di sampaikan oleh guru dan mengamati apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya; 2) Menanggapi, yaitu peserta didik mau terhadap suatu kejadian dengan berperan serta. Contoh: menjawab, mengikuti, menyetujui, menuruti perintah, menyukai dan sebagainya; 3) Menilai, yaitu peserta didik mau menerima atau menolak suatu kejadian melalui pernyataan sikap positif atau negatif. Contohnya: menerima, mendukung, ikut serta, meneruskan, mengabdikan diri, dan sebagainya; 4) Menyusun, yaitu apabila peserta didik berhadapan dengan situasi yang menyangkut lebih dari satu nilai, dengan senang hati menyusun nilai tersebut, menentukan hubungan antara berbagai nilai dan menerima bahwa ada nilai yang lebih tinggi daripada yang lain. Contoh: menyusun, memilih, mempertimbangkan, memutuskan, mengenali, membuat rencana dan sebagainya; 5) Mengenali ciri karena kompleks nilai, yaitu peserta didik secara konsisten bertindak mengikuti nilai yang berlaku dan menganggap tingkah laku ini sebagai bagian dari kepribadiannya. Contoh: percaya, mempraktikkan, melakukan, mengerjakan.

Dengan demikian partisipasi belajar merupakan kegiatan peserta didik yang mendengarkan guru dan mengamati apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, selain itu peserta didik juga dalam proses pembelajarannya mengikuti rangkaian kegiatan

pembelajaran seperti menjawab, mengikuti, menyetujui dan menuruti perintah, sehingga partisipasi belajar merupakan proses belajar di mana peserta didik mampu mengikuti seluruh komponen pembelajaran di mana komponen tersebut terdiri dari pra pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, sehingga dapat dikatakan peserta didik dapat dikatakan berpartisipasi jika peserta didik tersebut dapat melakukan respons yang positif terhadap proses pembelajaran yang telah direncanakan oleh guru.

1.4.2. Bentuk Partisipasi Belajar

Partisipasi peserta didik dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan demikian tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan bisa dicapai dengan maksimal. Adapun bentuk partisipasi menurut Effendi (dalam Astuti, 2011, hlm. 58), terbagi atas:

- 1) Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien; 2) Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Sardiman (2011, hlm. 101) partisipasi dapat terlihat aktivitas fisiknya, yang dimaksud adalah peserta didik giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain, ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau pasif. Aspek aktivitas fisik dan aktivitas psikis antara lain:

- 1) *Visual activities*, membaca dan memperhatikan; 2) *Oral activities*, menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, wawancara, diskusi, interupsi, dan sebagainya; 3) *Listening activities*, mendengarkan uraian, percakapan, diskusi; 4) *Writing activities*, menulis, menyalin; 5) *Drawing activities*, menggambar, membuat grafik, peta, dan sebagainya; 6) *Motor activities*, melakukan percobaan, membuat model; 7) *Mental activities*, menganggap, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan; 8) *Emotional activities*, menaruh minat, merasa bosan, gembira, tenang, dan sebagainya.

Aktivitas yang diuraikan di atas berdasarkan bahwa pengetahuan akan diperoleh peserta didik melalui pengamatan dan pengalamannya sendiri. Belajar adalah suatu proses di mana peserta didik harus aktif.

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selain itu Sudjana (1996, hlm. 21) juga menyampaikan bahwa peserta didik yang aktif berpartisipasi dapat dilihat dari : 1) Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahannya; 2) Berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses, belajar; 3) Menampilkan berbagai usaha atau keaktifan belajar dalam menjalani dan menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai keberhasilan; 4) Kebebasan atau keleluasaan melakukan hal tersebut di atas tanpa ada tekanan.

Di dalam proses pembelajaran guru dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dengan menimbulkan keaktifan belajar pada diri peserta didik. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru (Yeni herawati, 2008) diantaranya: 1) Menggunakan multi model dan multimedia; 2) Memberikan tugas secara individu maupun kelompok; 3) Memberikan kesempatan pada peserta didik melaksanakan eksperimen dalam kelompok kecil; 4) Memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal-hal yang kurang jelas, serta mengadakan tanya jawab dan diskusi.

Secara garis besar partisipasi merupakan keikutsertaan peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi menerima respons dari luar, menanggapi suatu permasalahan, dan menjawab dari suatu permasalahan yang sedang di bahas. Partisipasi peserta didik di dalam kelas akan mempengaruhi proses pembelajaran itu sendiri, di mana dengan partisipasi yang tinggi akan tercipta suasana pembelajaran yang efektif. Partisipasi peserta didik dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan demikian tujuan pembelajaran yang sudah di rencanakan bisa dicapai semaksimal mungkin.

Tidak ada proses belajar tanpa partisipasi dan keaktifan anak didik yang belajar. Setiap anak didik pasti aktif dalam belajar, hanya yang membedakannya adalah kadar/bobot keaktifan anak didik dalam belajar. Ada keaktifan itu dengan kategori rendah, sedang dan tinggi. Menurut Mulyasa (2011, hlm. 105) dari segi proses, pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik

Dengan demikian terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran di sini perlu kreativitas guru dalam mengajar agar peserta didik berpartisipasi dalam pembelajaran. Penggunaan strategi dan model yang tepat akan

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK(PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Model belajar mengajar yang bersifat partisipatoris yang dilakukan guru akan mampu membawa peserta didik dalam situasi yang lebih kondusif karena peserta didik lebih berperan serta lebih terbuka dan sensitif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga mampu menciptakan suasana kelas yang hidup, yaitu ada interaksi antar guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik.

2.4.3. Partisipasi Belajar dalam Pembelajaran PPKn

Partisipasi Peserta didik sangat penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Menurut Taniredja, dkk (2013) partisipasi siswa adalah penyertaan mental dan emosi siswa dalam situasi kelompok yang mendorong siswa untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan siswa bagi tercapainya prestasi belajar yang memuaskan. Sejalan dengan pendapat Khodijah (2016, hlm. 46) Partisipasi dapat mendorong aktivitas siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, selain itu partisipasi dapat membentuk siswa untuk selalu aktif sehingga mereka sadar bahwa ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui usaha keras dan siswa juga menyadari makna dan arti pentingnya belajar. Dengan demikian meningkatnya partisipasi peserta didik maka prestasi belajar juga akan semakin meningkat.

Partisipasi peserta didik dalam pembelajaran tentu di butuhkan dalam semua mata pelajaran salah satunya pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, karena menurut Utama (2016, hlm. 2499) *citizenship education* yang muatannya memberikan penekanan pada proses-proses demokrasi, partisipasi aktif, dan keterlibatan warga dalam masyarakat madani. Secara konseptual, yang dituju dalam PPKn adalah aspek perilaku. Dengan demikian pembelajaran PPKn sangat menekankan pada proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat, sehingga Pembelajaran PPKn akan efektif jika di dalamnya memberikan pelatihan keterampilan bagi siswa sebagai warga negara, salah satunya adalah partisipasi aktif. Partisipasi aktif siswa akan muncul melalui interaksi pembelajaran yang partisipatif. Keterampilan partisipasi aktif dimaksudkan untuk

memberdayakan peserta didik dalam merespons dan memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pembelajaran PPKn Partisipasi sangat di butuh kan guna untuk berkolaborasi dalam merespons pembelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang aktif. Menurut Purwanto (2009, hlm. 52) Partisipasi atau merespons (*responding*) adalah kesediaan memberikan respons dengan berpartisipasi. Pada tingkat ini siswa tidak hanya memberikan perhatian terhadap rangsangan tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan untuk menerima rangsangan. Hal ini Sesuai dengan tujuan PPKn bahwa partisipasi dalam PPKn sangat di butuh kan karena bagian dari tujuan PPKn itu sendiri yang di jelaskan oleh Soemantri (dalam Nurmalina dan Syaifullah, 2008, hlm.3) bahwa:

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang di perluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh -pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang ke semuanya itu diproses guna melatih siswa berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Berdasarkan tujuan di atas bahwa pendidikan kewarganegaraan di harapkan dapat membentuk siswa yang mampu berpikir kritis, analitis serta demokratis agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bernegara. Sejalan dengan pendapat Sumarsono, dkk (2006, hlm. 3) mengemukakan bahwa PKn dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Dengan demikian Perubahan kehidupan yang tak bisa diduga pasti terjadi. Negara berupaya mempersiapkan generasi yang akan datang untuk mengantisipasi dampak perubahan-perubahan sebagai pengaruh globalisasi. Hal ini diperlukan partisipasi masyarakat luas untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.5. Pendidikan Kewarganegaraan

1.5.1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana dalam membangun jati diri seseorang terutama dalam hal sadar akan tanggung sosial dan moral, interaksi dan

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK(PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

partisipasi dalam masyarakat, serta din seorang warga negara pendidikan politik. Sejalan dengan pendapat Menurut Deny (2013, hlm. 58) bahwa Penerapan moral *training* dalam pembelajaran inovatif pada pendidikan berbasis karakter diharapkan dapat: 1) Mengembangkan kecerdasan moral secara komprehensif; 2) Memberi pengalaman belajar bervariasi dengan suasana belajar yang menyenangkan; 3) Peserta didik lebih kritis dan kreatif; 4) Meningkatkan kematangan emosional; dan 5) mau berpartisipasi dalam proses perubahan.

Artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu pendidikan karakter dan *moral training* bagi peserta didik dalam lajarannya harus inovatif sehingga menciptakan dampak yang baik dan efektif kepada peserta didik. Karena menurut Zubaedi (2011, hlm. 2) bahwa pendidikan karakter dengan pola pembelajaran konvensional, hanya akan mengajarkan pendidikan moral sebatas tekstual semata dan kurang mempersiapkan peserta didik untuk menyikapi kehidupan yang kontradiktif.

1.5.2. Tujuan Pendidikan kewarganegaraan

Menurut Maftuh (2008, hlm. 137) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education* atau *citizenship education*) secara teoritis adalah untuk mendidik para peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis. Kemudian menurut Rahmat, dkk. (2013 hlm. 7) bahwa tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan adalah tumbuh-kembangnya kepekaan, ke tanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Hal tersebut sejalan dengan tujuan PPKn yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian Penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air." Adapun karakteristik dari PPKn menurut Wuryan dan Syaifullah (2008, hlm. 9) adalah lahirnya warga negara dan warga masyarakat yang berjiwa Pancasila, berani dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadikan warga negara yang baik dan cerdas yaitu warga negara yang peduli terhadap negara dan masyarakat dengan pola pikir yang kritis dan kreatif, bertanggung jawab, menjaga kedamaian, cinta tanah air, serta taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan kewarganegaraan menurut Permendikbud No. 59 Tahun 2014 memiliki tujuan khusus yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial; 2) Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif secara memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) Berpartisipasi secara aktif, cerdas dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya.

Berdasarkan pernyataan di atas, tujuan pendidikan kewarganegaraan yang dirumuskan pemerintah ini agar warga negara memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, memahami konstitusi negara, cerdas dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan empat pilar kenegaraan, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, negara dan memiliki rasa kemanusiaan.

Sejalan dengan hal di atas tujuan PPKn menurut NCSS (National Council The Sosial Studies) (dalam Syaifullah dan Wuryan, 2008, hlm. 76-77) yaitu 1) Pengetahuan dan keterampilan guna membantu memecahkan masalah dewasa ini; 2) Kesadaran terhadap pengaruh sains dan teknologi pada peradaban serta manfaatnya untuk memperbaiki nilai kehidupan; 3) Kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif; 4) Kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan terhadap nilai-nilai untuk kehidupan yang efektif dalam dunia yang selalu mengalami perubahan; 5) Menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang terus berkembang yang membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta baru, gagasan baru, serta cara hidup yang baru; 6) Peran serta dalam proses pembuatan keputusan melalui pernyataan pendapat kepada wakil-wakil

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rakyat, para pakar, dan spesialis; 7) Keyakinan terhadap kebebasan individu serta persamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi; 8) Kebanggaan terhadap prestasi bangsa, penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan oleh bangsa lain serta dukungan untuk perdamaian dan kerja sama; 9) Menggunakan seni yang kreatif untuk menyensitifkan dirinya sendiri terhadap pengalaman manusia yang universal serta pada keunikan individu; 10) Mengasihi serta peka terhadap kebutuhan, perasaan, dan cita-cita umat manusia lainnya; 11) Pengembangan prinsip-prinsip demokrasi serta pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pernyataan di atas, sudah jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang baik yaitu untuk membentuk warga negara yang berkarakter, memiliki nilai dan moral yang bisa diterapkan pada pemikiran dan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta terhadap tanah air diwujudkan dengan kehidupan yang demokratis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, serta mampu memecahkan masalah dengan bijak dan cerdas dengan pemikiran yang kritis dan kreatif sebagaimana tujuan utama PPKn yaitu *to be a good and smart citizenship*.

1.5.3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan memiliki perbedaan pada setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (2014, hlm. 223) bahwa ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan yaitu : 1) Pancasila, sebagai dasar Negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa; 2) UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat; 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan; 4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan berbangsa dan bernegara; final bentuk Negara Republik Indonesia; yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan memiliki 4 (empat) aspek yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.5.4. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi yang dapat menunjang untuk mencapai warga Negara yang baik dan cerdas. Sebagaimana menurut Monteiro (2015, hlm. 9) mengemukakan beberapa fungsi pendidikan kewarganegaraan, yaitu : Pertama, sebagai wahana untuk membentuk warga Negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kedua, sebagai media pendidikan demokrasi Pancasila sekaligus berfungsi sebagai benteng yang melindungi, memelihara, dan menjamin kelestarian jati diri serta nilai-nilai sosial budaya.

Sedangkan menurut Somantri (2001, hlm. 166) memberikan pemaparan mengenai fungsi PPKn yaitu "Usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar menjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan Kewarganegaraan untuk melandasi tujuan nasional yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari".

Berdasarkan pendapat di atas, pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi sebagai wahana membentuk warga negara yang cerdas dan menjadi media untuk pendidikan demokrasi Pancasila. Fungsi pendidikan kewarganegaraan dapat mengembangkan keterampilan, karakter, kecerdasan, baik dalam berpikir dan bertindak yang selanjutnya warga negara akan mampu melindungi, menjamin, dan menjaga jati diri serta nilai-nilai sosial dan budaya. Pendidikan kewarganegaraan akan menjadi bekal bagi generasi muda pada tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, di mana kelak generasi mudalah yang akan melanjutkan roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.5.5. Aspek-Aspek Kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Upaya mengembangkan kualitas warga negara secara utuh dalam berbagai aspek menurut Edy Sutrisno (2016, hlm. 32) sebagai berikut: 1) Kemelekwacanaan sebagai

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKn UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK(PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

warga negara (*civic literacy*), yakni pemahaman peserta didik sebagai warga negara tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia serta menyesuaikan perilakunya dengan pemahaman dan kesadaran itu; 2) Komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (*civic engagement*), yakni kemauan dan kemampuan peserta didik sebagai warganegara untuk melibatkan diri dalam komunikasi sosial kultural sesuai dengan hak dan kewajibannya; 3) Kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara (*civic skill and participation*), yakni kemauan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik sebagai warga negara dalam mengambil prakarsa/atau turut serta dalam pemecahan masalah sosial-kultur kewarganegaraan di lingkungannya; 4) Penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), yakni kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk berpikir secara kritis dan bertanggungjawab tentang ide, instrumentasi, dan praksis demokrasi konstitusional Indonesia; 5) Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (*civic participation and civic responsibility*), yakni kesadaran dan kesiapan peserta didik sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi konstitusional.

Kompetensi dasar warga negara yang harus dimiliki oleh warga negara dalam kehidupan sebuah negara demokratis dikemukakan oleh Remmy (dalam Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 19-20) yaitu: 1) *Acquiring and using information*; 2) *Assessing involvement*; 3) *Making decisions*; 4) *Making judgement*; 5) *Communicating*; 6) *Cooperating*; 7) *Promoting interests*.

Hal tersebut menyatakan bahwa kompetensi dasar yang harus dimiliki warga negara yaitu memperoleh dan menggunakan informasi, keterlibatan warga negara, membuat pertimbangan, membuat keputusan, berkomunikasi, bekerja sama, dan memperjuangkan kepentingan. Selain itu Bronson (dalam Winarno, 2013, hlm. 107) mengemukakan tiga komponen dalam Pendidikan Kewarganegaraan yakni Komponen utama pendidikan kewarganegaraan yang perlu diajarkan kepada peserta didik mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), dan sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*).

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan hal tersebut kompetensi pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengarahkan mereka agar menjadi warga negara yang baik meliputi tiga komponen, yakni pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), dan sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*).

2.5.5.1. Pengetahuan Kewarganegaraan *Civic Knowledge*

Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Hal ini didukung oleh pendapat Winarno (2013, hlm. 108) bahwa pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Bronson (dalam Winarno, 2013, hlm. 108-109) mengemukakan 5 (lima) pertanyaan mengenai komponen pengetahuan kewarganegaraan, yakni: 1) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahan?; 2) Apa fondasi-fondasi sistem politik?; 3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi mengejawatahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi?; 4) Hubungan suatu negara dengan negara-negara lain dan posisinya dalam masalah-masalah internasional?; 5) Apa peran warga negara dalam demokrasi?

Berdasarkan uraian di atas, pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dapat diartikan sebagai pengetahuan warga negara mengenai konsep-konsep negara, perannya sebagai warga negara, dan pengetahuan lainnya yang mendukung untuk menjadikan sebagai warga negara yang baik.

2.5.5.2. Keterampilan Kewarganegara *Civic Skill*

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) menurut Bronson (dalam Winarno, 2013, hlm. 146) terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu: 1) Kemampuan mengidentifikasi dan menggambarkan; 2) Kemampuan menjelaskan dan menganalisis; 3) Kemampuan menilai, mengambil dan mempertahankan pendapat tentang isu-isu publik

Berdasarkan uraian tersebut, keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) mengharuskan warga negara untuk mengaplikasikan apa yang telah diketahuinya yakni dengan melaksanakan partisipasi aktif dalam negara.

Fauzi Nurul Ismi, 2019

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN PPKN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 3 SMAN 7 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2.5.5.3. Sikap/Watak Kewarganegaraan *Civic Disposition*

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) adalah watak atau karakter yang harus dimiliki warga negara agar dapat bersikap selayaknya warga negara yang baik. Quigley (1991, hlm. 13-14) mengemukakan sejumlah karakteristik kepribadian atau watak yakni

Peradaban (penghormatan dan wacana sipil), tanggung jawab pribadi disiplin diri, kewarganegaraan sipil, pikiran terbuka (skeptisisme keterbukaan, pengakuan ambiguitas), kompromi (konflik prinsip, belas kasih, kemurahan hati, dan kesetiaan kepada bangsa dan prinsip-prinsipnya) “*Civility (respect and civil discourse), individual responsibility self-disciplin, civic midednes, open mindnedness (openness skepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles, compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles)*”

Berdasarkan uraian di atas, watak kewarganegaraan harus dimiliki oleh warga negara untuk menjadi warga negara yang baik. Warga negara harus mampu mengetahui, memahami, dan menerapkan bagaimana sikap atau watak yang seharusnya dimiliki dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari seorang warga negara.

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) merupakan salah satu komponen utama dari kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang secara umum mempunyai peran dalam mengantarkan warga negara untuk menjadi semakin dewasa dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sari YM, 2014, hlm. 64). Watak Kewarganegaraan (*civic disposition*) menurut Quigley (1991, hlm. 11) adalah “...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*” atau sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.